

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kawasan perkotaan saat ini sedang menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat perkotaan, beberapa diantaranya seperti kebutuhan akan ruang kota yang layak huni, tantangan perubahan iklim, dan mengurangi polusi lingkungan. Bahkan kondisi buruk ini telah mempengaruhi anak-anak sehingga meningkatnya permintaan akan kota yang ramah anak. Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada perkotaan terbukti secara signifikan dapat memperbaiki kualitas hidup di perkotaan. Meskipun memiliki fungsi dan peranan yang penting, RTH menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan ruang perkotaan lainnya, seperti perumahan, lalu lintas, perdagangan, industri (Vogler et al., 2023). Hal ini disebabkan perkotaan sendiri lebih mengutamakan fasilitas ruang yang menopang kegiatan perekonomian dibandingkan RTH karena dianggap tidak mendatangkan keuntungan finansial dalam jangka pendek (Adiyanta, 2018).

Secara umum kualitas dan kuantitas RTH mengalami penurunan yang sangat signifikan (Fitrianti, 2019). Penurunan kuantitas atau jumlah RTH di kawasan perkotaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi aspek teknis, ekonomi, kebijakan, dan politik (Prakoso & Herdiansyah, 2019). Aspek teknis terkait dengan perubahan fungsi lahan sebagai hasil dari penambahan jumlah penduduk perkotaan, yang mendorong baik pemerintah maupun sektor swasta untuk membangun infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Hasyimi & Suroso, 2017). Aspek ekonomi terkait dengan kendala pembiayaan dalam upaya penyediaan lahan RTH di wilayah perkotaan, yaitu keterbatasan lahan yang dikuasai oleh pemerintah sedangkan proses pembebasan lahan juga membutuhkan biaya yang besar (Paramesti, 2016). Aspek lainnya yaitu aspek kebijakan meliputi belum tersedianya alokasi RTH secara detail dengan terperinci dalam perencanaan tata ruang di setiap wilayah. Keadaan ini membuka peluang terjadinya alih fungsi yang tidak terkendali (Budiman et al., 2020). Pada aspek politik yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah RTH adalah masih lemahnya kemauan para pemangku kebijakan kawasan perkotaan untuk melaksanakan komitmen kebijakan RTH dengan melakukan

pengendalian, pengawasan, selain itu kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat perkotaan juga berkontribusi dalam optimalisasi penyediaan RTH (Paramesti, 2016).

Sejak perkotaan menjadi pusat dari kegiatan industri, penyediaan jasa, perdagangan dan pusat pemerintahan, mengakibatkan perekonomian di kawasan perkotaan tumbuh sangat pesat dibandingkan daerah lainnya. Hal ini mengubah kegiatan perekonomian menjadi tersentralisasi di kota dan lebih dominan pada pengembangan sektor industrial. Kondisi ini yang menyebabkan bergesernya pola mata pencaharian masyarakat yang awalnya sebagian besar di sektor pertanian bergerak memasuki era perekonomian baru yaitu ekonomi industri. Pergesaran ini membuat masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi ke perkotaan dan mendorong arus urbanisasi ke kawasan perkotaan. Pertambahan jumlah penduduk akibat arus urbanisasi tersebut yang menyebabkan terjadinya densifikasi (pemadatan/perapatan) penduduk dan permukiman yang sangat cepat tidak terkendali di bagian kota (Dwihatmojo, 2023).

Permasalahan kepadatan penduduk mempersempit ruang gerak masyarakat. Ruang berinteraksi menjadi minim akibat lahan-lahan yang ada digunakan untuk membangun gedung-gedung perkantoran, mall, dan perumahan (Faedhulloh et al., 2017). Arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang tidak terkendali, mengakibatkan naiknya permintaan akan kebutuhan berbagai prasarana, sarana dan fasilitas penduduk berupa pemukiman/perumahan, air minum, listrik, jalan-jalan, sarana transportasi kota, telepon, kesehatan, pendidikan, pasar, pencegahan bahaya kebakaran, saluran air hujan dan limbah, sarana pembuangan sampah, dan sebagainya yang harus disediakan oleh pemerintah kota setempat. Semakin meningkatnya permintaan untuk permukiman dan lahan terbangun akan menyebabkan semakin merosotnya kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat pun tidak dapat mencegah alih fungsi lahan di perkotaan. Jika pemerintah kota tidak menindaklanjuti keberadaan ruang-ruang publik semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas (Hariyanto & Rangkuti, 2020).

Pertumbuhan ekonomi perkotaan yang sangat cepat seringkali mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Keadaan ini mengakibatkan munculnya kesenjangan keadilan dan kemanusiaan di dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, hingga minimnya akses bagi kaum marjinal (Suhartini, 2015), yang terdiri dari anak-anak, lansia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas (difabel), veteran perang, tunawisma, etnik minoritas (BRIN, 2022). Menurut data dari UNICEF, sebanyak 43,24% anak di Indonesia tinggal di perkotaan dan

perkiraan jumlah ini akan meningkat menjadi 60% pada tahun 2030. Anak merupakan setiap manusia yang berada dibawah usia delapan belas tahun dan pada masa anak usia dini merupakan periode emas bagi perkembangan anak dimana 50% perkembangan kecerdasan terjadi pada usia 0-4 tahun, 30% berikutnya hingga usia 8 tahun. Periode emas ini sekaligus merupakan periode kritis bagi anak dimana perkembangan yang didapatkan pada periode ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak hingga dewasa. Akan tetapi sebagian besar dari jutaan anak yang hidup di kawasan perkotaan belum merasa tenang dan nyaman melakukan kegiatan sehari-hari seperti anak-anak yang tinggal di daerah kumuh, pemukiman liar yang padat penduduk, perumahan yang kurang sehat dan kurangnya fasilitas umum seperti fasilitas air bersih, sanitasi dan pembuangan sampah (Chandra & Putri, 2021).

Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa anak-anak yang akses bermainnya terbatas atau tidak dapat bermain di luar ruangan cenderung mengalami permasalahan pada tumbuh kembangnya yang meliputi perkembangan moral, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik motoric dan perkembangan sosial emosional (Handayani, 2019; Talango, 2020). Dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki akses bermain di luar ruangan sebagai tempat eksplorasi dan membentuk hubungan yang kuat dengan alam. Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk melakukan perencanaan tata ruang kota dengan meningkatkan ruang bermain yang dekat dengan rumah anak. Memudahkan anak-anak untuk dapat bermain di ruang informal maupun ruang formal. Ruang tersebut merupakan ruang yang didesain khusus bermain dengan banyak sarana dan multifungsi. Salah satu fasilitas yang dapat menampung kegiatan anak di lingkungan perkotaan adalah Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang mudah dijangkau kapan pun sebagai tempat bermain dan rekreasi bagi mereka. Namun, pada kenyataannya seringkali RTHP dirancang tidak ramah anak, hanya menementingkan sarana fasilitas penunjang perkotaan dibandingkan elemen alamnya. Semua kendala tersebut dapat mengancam prinsip-prinsip RTH yang mudah diakses, aman dan bebas untuk siapa saja. Pada akhirnya membuat anak-anak perkotaan absen dari ruang publik (Vidal & Seixaasa, 2022).

Kemantren Umbulharjo merupakan wilayah pemerintahan kota Yogyakarta yang memiliki paling banyak RTHP dibandingkan dengan kemantren lainnya. Namun, tingkat kemiskinannya merupakan yang tertinggi di Kota Yogyakarta. Meskipun jumlah penduduknya paling tertinggi yaitu 70.538 jiwa pada tahun 2021 dibandingkan dengan kawasan lainnya kepadatan penduduk Kemantren Umbulharjo merupakan yang paling rendah (Ekowati, 2021). Ketidakseimbangan ini

juga dapat dilihat pada sisi perekonomian dimana mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun berbanding terbalik bila dilihat dari sisi konsep pembangunan berkelanjutan dan pembangunan kualitas hidup manusia yang justru semakin mengalami penurunan. Meski begitu, tidak mudah bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan yang ditopang oleh infrastruktur memadai. Sementara, tuntutan lain yang dihadapi oleh pemerintah adalah dalam hal perubahan pola hidup masyarakat dan dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan pembangunan yang berorientasi ekonomi.

Dari paparan permasalahan yang didapatkan menunjukkan peran penting ruang publik khususnya RTHP yang terintegrasi dengan RBRA bagi masyarakat perkotaan terutama anak-anak. Hal ini pula yang mendesak berbagai kota di seluruh penjuru dunia untuk menerapkan pembangunan kota kembali (*rewilding*) melalui proses pembangunan inklusif yang melibatkan anak-anak, dimana suara, kebutuhan, dan hak mereka menjadi pertimbangan penting. Keuntungan dari membangun kota kembali (*rewilding*) dapat meningkatkan pemulihan keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Karena sifat RTHP yang formal dan tidak terbatas, pembangunan kota kembali (*rewilding*) memerlukan stimulasi elemen alam yang meningkatkan eksplorasi dan kemampuan imajinasi anak-anak. Hal ini sebagai permulaan untuk memperkenalkan kembali keanekaragaman hayati yang hilang ke ruang publik dan meningkatkan komunikasi dalam keluarga maupun antar generasi, dan hubungan yang lebih dekat dengan alam dan tercapainya tujuan terkait *planetary boundaries* (Vidal & Seixas, 2022).

Berangkat dari hal tersebut maka diperlukan penelitian yang mengkaji Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) sebagai Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di Kemantren Umbulharjo.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini dapat dibagi menjadi poin-poin penting sebagai berikut :

- a. Bagaimana kesesuaian Ruang Terbuka Hijau Publik untuk difungsikan sebagai Ruang Bermain Ramah Anak berdasarkan aspek-aspek tumbuh kembang anak dan standar RBRA?
- b. Bagaimana potensi Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai Ruang Bermain Ramah Anak untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi khususnya di Kemantren Umbulharjo dan pada umumnya Kota Yogyakarta ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi potensi Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai Ruang Bermain Ramah Anak dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui pemetaan aktivitas berdasarkan standar RBRA.
- b. Mencari permasalahan utama Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai Ruang Bermain Ramah Anak berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kemantren Umbulharjo.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk :

- a. Peningkatan fasilitas Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai Ruang Bermain Ramah Anak berdasarkan temuan lapangan.
- b. Sumber informasi terkait berbagai potensi Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai Ruang Bermain Ramah Anak